



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAIMIN
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 149865

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.842.859.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 262.428.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 379.040.000
3. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 411.362.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/93 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 310.832.000
5. Tanah Seluas 481 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 258.297.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 220.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 193.590.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 40.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH GR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 193.050.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 240.590.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.478.891.840
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.755.930.840
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.755.930.840

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.